

Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kabupaten Bengkalis. (Studi Kasus Di Kecamatan Bengkalis)

Josevin Anastasya¹, Parjiyana²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No.133
Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: josevinanastasya@student.uir.ac.id

Abstract

This study analyzes household waste governance by the Environmental and Sanitation Agency (DLH) in Bengkalis Regency, with a case study in Bengkalis District. The research aims to evaluate the waste management system based on three governance indicators: (1) community participation, (2) government policies, and (3) waste management programs (including the implementation of 3R: Reduce, Reuse, Recycle). The study examines waste collection, transportation, processing, and disposal mechanisms, as well as the role of stakeholders in supporting sustainable governance. A descriptive quantitative approach is used, with data collected through surveys and field observations. The analysis focuses on the extent to which DLH's policies and programs are implemented and the level of community involvement in waste management processes. The findings are expected to provide recommendations for strengthening waste governance, such as enhancing policy synergy, optimizing programs, and adopting participatory approaches to ensure sustainability. This study also highlights the critical role of local government in establishing a structured and accountable waste governance framework while fostering collaboration between DLH and the community. The results can serve as a reference for stakeholders in designing integrated waste management strategies for Bengkalis.

Key Words : Governance, household waste, community participation, environmental policy, 3R programs,

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tata kelola sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Bengkalis, dengan studi kasus di Kecamatan Bengkalis. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah berdasarkan tiga indikator tata kelola: (1) partisipasi masyarakat, (2) kebijakan pemerintah, dan (3) program pengelolaan sampah (termasuk implementasi 3R: Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian ini mengkaji mekanisme pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah, serta peran stakeholder dalam mendukung tata kelola yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei dan observasi lapangan. Data dianalisis untuk memahami sejauh mana kebijakan dan program DLH diimplementasikan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola sampah, seperti peningkatan sinergi kebijakan, optimalisasi program, dan pendekatan partisipatif untuk mendukung keberlanjutan. Studi ini juga menyoroti peran kritis pemerintah daerah dalam menciptakan kerangka tata kelola sampah yang terstruktur dan akuntabel, sekaligus mendorong kolaborasi antara DLH dan masyarakat. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merancang strategi pengelolaan sampah yang integratif di wilayah Bengkalis.

Key Words : Tata kelola, sampah rumah tangga, partisipasi masyarakat, kebijakan lingkungan, program 3R,

Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan adalah tata kelola sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga menjadi masalah yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta estetika wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kabupaten besar di Provinsi Riau menghadapi permasalahan serius terkait timbulan sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), jumlah timbulan sampah pada tahun 2020 mencapai 93.488,30 ton dengan pengurangan sampah hanya sekitar 15,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan armada pengangkut, kurangnya fasilitas pemrosesan akhir (TPA), serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya.

Fenomena di Kecamatan Bengkalis menunjukkan bahwa meskipun pengangkutan sampah rumah tangga berjalan rutin setiap hari, masalah penumpukan justru terjadi pada tingkat pengelolaan internal DLHK. Keterbatasan infrastruktur, kapasitas tenaga kerja, serta belum optimalnya fasilitas daur ulang dan pemrosesan menjadi tantangan utama. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah maupun program daur ulang cukup tinggi, namun kontribusi ini belum mampu mengatasi masalah mendasar yang bersumber dari sistem pengelolaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tata kelola sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bengkalis dengan studi kasus di Kecamatan Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengevaluasi kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah rumah tangga yang diterapkan, (2) menganalisis program dan infrastruktur yang dijalankan dalam mendukung sistem pengelolaan, serta (3) menilai peran serta masyarakat dalam mendukung tata kelola sampah rumah tangga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola sampah di tingkat daerah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan isu global yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi. Menurut penelitian Syahbani (2023), penerapan program Reduce, Reuse, Recycle (3R) terbukti efektif dalam menurunkan volume sampah di kawasan perkotaan. Temuan ini sejalan dengan regulasi nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan paradigma baru pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumbernya. Namun, studi tersebut juga menggarisbawahi bahwa efektivitas program 3R sangat

bergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, meskipun terdapat Perbup Nomor 38 Tahun 2018 dan Perda Nomor 5 Tahun 2018, implementasi konsep 3R belum menunjukkan hasil yang optimal.

Selain pendekatan teknis, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan tata kelola sampah. Made (2021) menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilahan, daur ulang, dan bank sampah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan. Dalam kasus Bengkalis, masyarakat sudah menunjukkan keterlibatan relatif baik melalui iuran sampah dan program bank sampah, namun kontribusi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh DLHK.

Studi lain oleh Apriyani (2021) menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam pengelolaan sampah bukan hanya pada kesadaran masyarakat, tetapi juga pada lemahnya tata kelola institusi pengelola. Keterbatasan armada, minimnya tenaga kerja, dan kurangnya fasilitas pemrosesan akhir menyebabkan sampah tetap menumpuk di TPA meskipun pengangkutan berjalan rutin. Kondisi ini serupa dengan fenomena di Kecamatan Bengkalis, di mana masalah utama bukan terletak pada warga, melainkan pada kapasitas internal DLHK dalam mengelola alur sampah secara holistik.

Lebih lanjut, Yunita (2019) menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai mampu mengatasi keterbatasan anggaran dan infrastruktur pemerintah daerah. Hal ini relevan dengan kebijakan Kabupaten Bengkalis yang mendorong peran aktif BUMD maupun pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih lemah, sehingga potensi kolaborasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan objek penelitian tata kelola sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bengkalis dan subjek penelitian rumah tangga di Kecamatan Bengkalis. Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga sebanyak 86.114, dengan sampel 99 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Selain itu, pejabat DLHK serta tokoh masyarakat dijadikan informan kunci untuk memperkaya data penelitian.

Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa skala Likert untuk kuesioner, panduan wawancara semi-terstruktur, dan lembar observasi. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif untuk data kuantitatif, serta analisis tematik untuk data kualitatif. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas tata kelola sampah rumah tangga di Kecamatan Bengkalis.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah responden penelitian adalah 98 orang dengan variasi usia dan pekerjaan yang berbeda. Sebagian besar responden berusia 17–25 tahun (51%), diikuti usia 26–40 tahun (26%), dan di atas 40 tahun (23%). Dari segi pekerjaan, mayoritas adalah ibu rumah tangga/tidak bekerja (64%), diikuti pelajar/mahasiswa (21%), pegawai swasta (12%), dan buruh harian lepas (3%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh peran keluarga, khususnya perempuan, serta generasi muda yang memiliki potensi besar dalam kampanye kesadaran lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkalis tergolong cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% responden aktif melakukan pemilahan sampah, meskipun efektivitas kampanye kesadaran masih terbatas, dengan 21% menilai cukup efektif dan 5% menilai kurang efektif. Wawancara juga mengungkapkan bahwa tantangan utama berasal dari sumber sampah rumah tangga yang belum sepenuhnya dipilah dengan benar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Made (2021), yang menekankan pentingnya keterlibatan warga sebagai faktor kunci keberhasilan program 3R. Dengan demikian, meskipun tingkat kesadaran cukup tinggi, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih konsisten (Tabel 1).

Tabel 1.
Tanggapan Masyarakat Terkait Partisipasi Warga dalam Penanganan Sampah

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.	78	18	2	98
2.	Kampanye kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah (frekuensi, efektivitas).	69	23	6	98
Jumlah		147	41	8	176.5
Rata-rata		73.5	20.5	4	98
Persentase		74%	21%	5%	100%

Sumber: Data Olah Penulis, 2025

Selanjutnya, dari sisi kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Bengkalis telah berupaya memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui berbagai langkah, antara lain penyediaan saluran komunikasi pengaduan (website, telepon, dan media sosial) serta pengawasan lapangan secara rutin untuk memastikan kinerja petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73% responden menilai ketepatan waktu pengumpulan sampah sudah baik, namun dalam aspek pemilahan oleh petugas masih terdapat kelemahan karena 34% responden menilai cukup dan kurang. Hal ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, tetapi efektivitas implementasi masih menjadi tantangan. Sesuai dengan pandangan Apriyani (2021), keberhasilan kebijakan persampahan tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga konsistensi pelaksanaan di lapangan (Tabel 2).

Tabel 2.

Tanggapan Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Ketepatan waktu pengumpulan sampah oleh pegawai	79	11	8	98
2.	Ketepatan pemilahan sampah oleh pegawai	65	30	3	98
Jumlah		144	41	11	136
Rata-rata		72	20.5	5.5	98
Persentase		73%	21%	6%	100

Sumber : Data Olah Penulis, 2025

Meskipun berbagai kebijakan telah dijalankan, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah permasalahan mendasar. Keterbatasan armada pengangkut sering menyebabkan keterlambatan pengumpulan sampah di beberapa titik. Selain itu, minimnya fasilitas pemilahan dan daur ulang membuat sebagian besar sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kurangnya tenaga kerja lapangan juga menjadi hambatan tersendiri dalam efektivitas pengangkutan. Untuk menanggulangi masalah ini, DLHK telah menyusun masterplan pengelolaan sampah dan melakukan evaluasi rutin setiap 3–6 bulan guna menampung aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73% responden menilai langkah perbaikan ini baik, meskipun 26% lainnya menilai cukup dan kurang. Hal ini mendukung temuan Yunita (2019) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam memperkuat tata kelola persampahan (Tabel 3).

Tabel 3.

Tanggapan Masyarakat Terkait Pemerintah dalam Pemecahan Masalah

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		B	CB	KB	
1.	Masalah dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah	69	20	9	98
2.	Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh DLH terhadap masalah	77	14	7	98
Jumlah		146	34	16	196
Rata-rata		73	17	8	98
Persentase		73%	17%	9%	100%

Sumber : Data Olah Penulis, 2025

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Bengkalis sudah berada pada arah yang positif, ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan sarana, tenaga kerja, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi melalui edukasi berkelanjutan, serta sinergi antar-stakeholder menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif mengenai tata kelola pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kecamatan Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tata kelola berada pada kategori “cukup baik” dengan pengukuran terhadap tiga indikator utama, yaitu partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan program pengelolaan. Meskipun kerangka tata kelola telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Partisipasi masyarakat, khususnya dalam pemilahan sampah dari sumber dan keterlibatan dalam program 3R, masih rendah akibat kurangnya kesadaran dan keterlibatan aktif warga. Kebijakan pemerintah daerah melalui Perbup No. 41 Tahun 2023 telah menjadi pedoman formal, tetapi implementasinya belum merata terutama dalam penegakan aturan serta penyediaan sumber daya di tingkat kecamatan. Sementara itu, program edukasi dan sosialisasi yang dijalankan DLH memang sudah dilakukan, namun belum optimal dan berkelanjutan karena sebagian besar masih bersifat insidental tanpa tindak lanjut yang memadai untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Ahsan, S. E. (2017). Prinsip-prinsip pengelolaan sampah.
- Apriyani. (2021). Analisis penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) pada pengelolaan sampah rumah tangga di RT 04 Kelurahan Tenun Samaranda Seberang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*.
- Barnard, C. I. (1938). *The functions of the executive*. Harvard University Press.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2020). *Statistik sampah di Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Budi, S. (2021). *Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia: Tinjauan dan tantangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Budiarjo, E. (2019). *Pengelolaan sampah dan kebijakan pemerintah*. Jakarta: Penerbit Grafindo.
- Daft, R. L. (2004). *The new era of management*. South-Western College Pub.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public administration: An action orientation* (7th ed.). Cengage Learning.
- Dubin, P. (n.d.). *Public administration: A new perspective*.
- Erika Revilda. (2021). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Kita Menulis.
- Hasibuan, M. S. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman. (2009). *Manajemen dan administrasi: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Laporan tahunan pengelolaan sampah 2020*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (1968). *Principles of management: An analysis of managerial functions*. McGraw-Hill.

- Kusnadi, H. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Maksudi, H. (2017). *Dasar-dasar administrasi publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiana, E., Junaidi, A., & Rahmat, S. (2021). Tantangan pengelolaan sampah di kota besar. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 20–30.
- Mintzberg, H. (1979). *The structuring of organizations: A synthesis of the research*. Prentice-Hall.
- Mooney, J. D., & Reiley, A. C. (1931). *Onward industry! The principles of organization and their significance to modern industry*. Harper & Brothers.
- Ni Made Armadi. (2021). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola sampah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 35(1), 9–24.
- Novan Syahbani. (2023). Efektivitas penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga berkonsep 3R di Kelurahan Cempaka Putih Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- Perda No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sampah.
- Perbup Kabupaten Bengkalis No. 41 Tahun 2023.
- Perbup No. 69 Tahun 2021.
- Purnamasari, D. (2020). *Evaluasi program pengelolaan sampah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Rahayu, S. (2022). *Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah: Studi kasus dan implementasi*. Surabaya: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Rina, D., & Ahmad, Y. (2020). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di perkotaan. *Jurnal Studi Pembangunan*, 8(3), 60–75.
- Robbins, S. P. (1990). *Organization theory: Structure, design, and applications* (3rd ed.). Prentice-Hall.
- Setiawan, H. (2021). Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 30–40.
- Siagian, S. P. (2018). *Filsafat administrasi*.
- Slamet, A. (2022). *Evaluasi program pengelolaan sampah: Pendekatan kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1995). *Management* (6th ed.). Prentice-Hall.
- Sudradjat, R. (2018). *Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat*. Jakarta: Penerbit LIPI Press.
- Sutrisno, B. (2020). *Strategi daur ulang sampah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.
- Widiastuti, N. (2020). *Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yasin. (2024). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan: Studi kasus di Kampung Salo Kendari. *Journal of Community Service*.

Yunita Ismail. (2019). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *AIA Journal*.
<http://dx.doi.org/10.33021/aia.v1i1.742>